



News Title : Bappebti Percepat Implementasi SRG untuk Membentuk Tata Niaga SRG yang Efektif	
Media Name : jakartadaily.id	Journalist : Sontry Napitupulu
Publish Date : 23 July 2024	Tonality : Positive
News Page :	News Value : 0
Resources : Novrial (Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatra Barat), Nusa Eka (Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Ahli Utama Bappebti)	Ads Value : 0
Section/Rubrication : Ekonomi Bisnis	Topic : Resi Gudang



JAKARTADAILY.ID - Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (**bappebti**) Kementerian Perdagangan konsisten mendorong perkembangan Sistem Resi Gudang (**SRG**), salah satu upaya yang dilakukan oleh Bappebti dalam mengakselerasi implementasi SRG dan menciptakan tata niaga produk SRG yang lebih efisien adalah dengan melakukan pertemuan teknis SRG yang kali ini diselenggarakan di Padang, Sumatra Barat, Kamis, 18 Juli.

"Dengan melaksanakan pertemuan teknis, maka kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dapat terdeteksi. Di samping itu, pertemuan ini juga menjadi forum konsultasi dalam upaya mendorong percepatan implementasi SRG," ujar Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) Ahli Utama Bappebti, Nusa Eka.

Menurutnya, pertemuan tersebut juga diharapkan memberikan solusi dan terobosan dalam penerapan SRG serta dapat membuka peluang bagi pengelola gudang SRG untuk memanfaatkan gudang yang tidak aktif.

Baca Juga:
Bappebti Ajak Pelaku Usaha CPO Kalbar Tidak Gunakan Bursa Malaysia dan Rotterdam Tapi Pakai Bursa CPO Indonesia

"Pemerintah daerah berperan penting dalam melakukan pembinaan untuk mendukung implementasi SRG di daerah. Bappebti berharap, pengelola gudang SRG dapat mengoptimalkan perannya, tidak hanya sebagai pemelihara komoditas dalam gudang semata, namun juga mampu meningkatkan fungsi gudang sebagai sarana pembuka akses pembiayaan, peningkatan posisi tawar, dan pemasaran komoditas bagi pasar lokal dan luar negeri," tegas Nusa Eka.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG merupakan salah satu instrumen perdagangan yang bertujuan mendukung terwujudnya ketahanan produk dan distribusi serta memberikan kesempatan bagi penyimpanan atau pemilik barang untuk memperoleh alternatif permodalan dari lembaga pembiayaan bank maupun nonbank.

Selain itu, implementasi SRG secara optimal dan berkesinambungan diharapkan dapat menciptakan rantai perdagangan yang lebih efisien melalui transaksi jual beli antara penyimpanan atau pemilik barang dengan pembeli, baik secara langsung maupun lewat *daring*.

Dalam perkembangannya, implementasi SRG cenderung mengalami peningkatan. Selama lima tahun terakhir, rata-rata transaksi penertiban resi gudang tercatat sebesar Rp501 miliar dengan nilai transaksi tertinggi terjadi pada 2022, yaitu sebesar Rp13 triliun. Sedangkan, pada 2024, penertiban resi gudang tercatat sebesar Rp1,6 triliun dengan nilai pembiayaan Rp978 miliar.

Baca Juga:
Dorong Penguatan Hillisasi Komoditas Tambang Strategis, Bappebti Terapkan Instrumen PBK dan Sistem Resi Gudang

"Minat pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG juga semakin meningkat. Hingga saat ini, terdapat 118 pengelola gudang SRG di seluruh Indonesia yang telah mendapat persetujuan dari Bappebti," terang Nusa Eka.

Khusus di Provinsi Sumatra Barat, Bappebti telah memberikan bantuan berupa lima gudang SRG beserta sarana dan prasarana kelengkapan gudang. Dari lima gudang tersebut, terdapat tiga gudang yang telah memiliki pengelola gudang, yaitu di Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Solok, dan Kabupaten Limapuluh Kota. Selain itu, terdapat pula satu gudang SRG swasta untuk komoditas gambir di Kabupaten Payakumbuh.

Tercatat sejak 2009, resi gudang yang diterbitkan di Provinsi Sumatra Barat sebanyak delapan resi gudang untuk 5129 ton gabah, jagung, dan gambir dengan total nilai resi gudang Rp23,36 juta dan pembiayaan sebesar Rp137,9 juta pada 2021.

"Komitmen dan peran aktif pemerintah daerah Sumatra Barat serta pihak terkait sangat penting untuk mengoptimalkan implementasi SRG maupun pasar lelang komoditas (PLK). Hal tersebut mengingat daerah yang sukses menjalankan implementasi SRG selalu didukung pemerintah setempat, baik melalui dukungan sumber daya manusia, anggaran, jaringan pemasaran, literasi, edukasi, maupun kebijakan," jelas Nusa Eka.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat, Novrial menyampaikan strategi pengembangan SRG di Sumatera Barat, di antaranya mengimplementasikan SRG di gudang-gudang milik pemerintah setempat yang saat ini belum aktif, dukungan anggaran pengembangan gudang guna memberikan nilai tambah komoditas, peningkatan peran pemerintah daerah dan lembaga pendukung dalam pengembangan SRG, serta pelibatan aktif dunia usaha untuk motor penggerak.

“Termasuk dengan melaksanakan sosialisasi dan pelatihan untuk semua entitas gudang SRG seperti pelaku usaha, pengelola gudang, aparat, dan lainnya. Selain itu, juga memberikan perluasan akses pembiayaan SRG, mengidentifikasi potensi komoditas unggulan daerah yang dapat disimpan di gudang SRG, juga integrasi SRG dengan pasar lelang komoditas,” tutup Novrial.

Berita terkini lainnya dari tim redaksi kami dapat diakses lebih cepat melalui [Google News](#)

Halaman:

1

2

Sebelumnya

Editor: Bona Cipto Ventura